

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 10 Desember 2020 Maroko secara resmi mengambil pendekatan pragmatis dengan menandatangani Deklarasi Bersama Abraham Accords.¹ Kebijakan normalisasi yang diambil oleh Maroko mencerminkan langkah serupa yang sebelumnya telah dilakukan oleh Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, dan Sudan pada tahun yang sama. Abraham Accords adalah serangkaian perjanjian diplomatik yang ditandatangani pada tahun 2020 yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab.² Perjanjian ini diinisiasi dan didukung penuh oleh Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai upaya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Nama "Abraham" merujuk pada figur patriarkal yang dihormati dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi, yang mencerminkan keinginan untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara negara-negara yang sebelumnya terlibat dalam konflik atau tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.³

¹ Minister of Foreign Affairs and International, "Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full Normalization Between The Uni Emirates Arab and The State of Israel," *Www.State.Gov*.

² Adam Zeidan, "Abraham Accords," *Britannica*, September 20, 2024, diakses pada November 26, 2024, <https://www.britannica.com/topic/Abraham-Accords>.

³ Miriam F. Elman and Raefa Z. Shams, "'We Are Cousins. Our Father Is Abraham...': Combating Antisemitism and Anti-Zionism with the Abraham Accords," *Religions* 13, no. 10 (September 26, 2022): 901.

Menurut R. P. Barson, normalisasi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meredakan ketegangan, memperbaiki hubungan, serta menahan atau menyelesaikan sumber utama konflik.⁴ Proses ini melibatkan berbagai teknik dan mekanisme untuk menciptakan, memulihkan, atau mempertahankan kondisi yang dianggap normal, terutama dalam pemulihan hubungan antarnegara yang terdampak perang, bencana, atau peristiwa besar lainnya.⁵ Normalisasi tidak selalu dipaksakan melalui kekuatan militer atau metode koersif, meskipun dalam beberapa kasus hal ini pernah digunakan. Salah satu bentuk dari proses normalisasi adalah kerja sama dan hubungan diplomatik.

Normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel dalam Abraham Accords mencakup berbagai aspek kerja sama strategis di bidang diplomasi, ekonomi, dan keamanan. Dalam ranah diplomasi, kedua negara sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan membuka kembali kantor penghubung yang sebelumnya ditutup.⁶ Di sektor ekonomi, kerja sama difokuskan pada investasi, perdagangan, pariwisata, serta pengembangan teknologi dan inovasi dengan ketersediaan Israel sebagai penyedia teknologi pertanian dan keamanan siber bagi Maroko. Selain itu, kerja sama militer dan keamanan juga menjadi komponen penting dalam perjanjian ini, termasuk pembelian sistem pertahanan dan pelatihan militer.⁷

Akan tetapi kebijakan Maroko ini dianggap "tidak normal" sehingga menimbulkan kontroversi. Hal ini dikarenakan isu Palestina atas pendudukan Israel adalah isu penting dalam kebijakan luar negeri Maroko sejak dulu karena identitas

⁴ R.P. Barston, *Modern Diplomacy Fourth Edition* (New York: Routledge, 2017).

⁵ Gëzim Visoka and Nicolas Lemay-Hébert, "Normalization in World Politics," *Perspectives on Politics* (September 11, 2022): 1–2.

⁶ KKI Policy Brief, *The Significance of the Abraham Accords for Morocco*, 2022.

⁷ Intissar Fakir, *Morocco and Israel Opportunities, Military, and Moral Hazards*, December 2022.

keislaman yang kuat dan komitmen historis Maroko terhadap solidaritas Arab dan Islam. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim (99%), Maroko secara konsisten mendukung perjuangan Palestina dalam berbagai forum internasional, termasuk Organisasi Kerjasama Islam (OKI) melalui Komite Al-Quds. Maroko juga aktif menyuarakan dukungan terhadap status Yerusalem sebagai kota suci bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi dengan menentang upaya Israel yang mengubah identitas kota tersebut.⁸ Sehingga normalisasi ini dianggap tidak normal karena Maroko bersikap pragmatis dalam kebijakan luar negerinya dengan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa prasyarat penyelesaian konflik Palestina atas pendudukan Israel yang adil. Pendekatan ini berbeda dengan normalisasi yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain yang menetapkan prasyarat penghentian rencana aneksasi Tepi Barat sebagai bagian dari kesepakatan dengan Israel.⁹ Di sisi lain, Maroko juga memiliki karakteristik historis yang menunjukkan relasi khusus dengan komunitas Yahudi sehingga menciptakan landasan sosio-kultural yang berbeda secara fundamental dengan negara lain di kawasan Arab.¹⁰

Kebijakan normalisasi Maroko ini memunculkan reaksi yang beragam dari domestik dan internasional. Sekitar 88% warga Maroko menolak normalisasi hubungan dengan Israel.¹¹ Kemarahan masyarakat Maroko ini terlihat pada aksi yang diikuti oleh puluhan ribu demonstran Maroko terutama dari Pan-Arab dan Partai Islam yang bermayoritas Muslim Maroko turun ke jalanan di kota-kota

⁸ Muhammad Azhar, *Organisasi Kerjasama Islam (OKI)*, n.d.

⁹ Sidiq Ahmadi and Jasmine Armantyas Safannah Bumi, "Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab – Israel: Analisis Rasionalitas Kebijakan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab," *POLITEA* 5, no. 2 (December 17, 2022): 258.

¹⁰ Michael Peres, "A Passage Back: Morocco's Enduring Allure to Its Jewish Diaspora," *The Algemeiner*, last modified 2023, accessed April 3, 2025, <https://www.algemeiner.com/2023/10/04/a-passage-back-moroccos-enduring-allure-to-its-jewish-diaspora/>.

¹¹ Arab Barometer, *Arab Barometer VI Morocco Country Report*, 2021, www.arabbarometer.org.

(seperti; Rabat, Tangier, Casablanca, dan 27 kota lainnya). Para demonstran datang dengan membawa slogan-slogan pro-Palestina dan menunjukkan bendera Israel yang dibakar pada protes tersebut sebagai bentuk penolakan dan menentang kerjasama kedua negara.¹²

Aksi penolakan tersebut telah terjadi sejak awal tahun 2021 hingga tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dikarnakan tidak mendapat respon dari aksi turun jalan tersebut, akhirnya aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Maroko juga mengajukan petisi yang telah didukung 10.200 tanda tangan untuk mendesak pembatalan normalisasi hubungan dengan Israel. Namun petisi anti-normalisasi tersebut ditolak oleh Pemerintah Maroko dengan alasan tidak sesuai dengan prosedur semestinya.¹³

Dari sisi Internasional, keputusan Maroko ini juga mendapat kecaman dari dunia seperti Aljazair dan Iran. Iran secara tegas mengecam keputusan Maroko yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina yang dapat melemahkan persatuan Islam. Menurut pemimpin spiritual Iran Imam Khamenei menyatakan normalisasi tersebut merupakan kesalahan strategis dan mendesak dunia Arab segera membatalkan normalisasi dengan Israel.¹⁴

Aljazair sebagai negara tetangga Maroko juga ikut mengecam keputusan Maroko. Menteri Luar Negeri Aljazair, Ramtane Lamamra, menyebut kesepakatan

¹² Agencies and TOI staff, "Tens of thousands rally in support of Palestinians in Morocco as Israel-Hamas war rages," *Times of Israel*, October 15, 2023, diakses pada November 24, 2024, <https://www.timesofisrael.com/tens-of-thousands-rally-in-support-of-palestinians-in-morocco-as-gaza-war-rages/>.

¹³ Basma El Atti, "Morocco government declines anti-normalisation with Israel petition signed by over 10,000," *The New Arab*, January 11, 2024, diakses pada November 24, 2024, <https://www.newarab.com/news/morocco-government-declines-anti-normalisation-petition>.

¹⁴ Admin, "Imam Khamenei Desak Dunia Arab Batalkan Normalisasi Israel," *Deutsche Welle*, last modified 2021, accessed April 11, 2025, <https://www.dw.com/id/imam-khamenei-desak-dunia-arab-batalkan-normalisasi-israel/a-59619139>.

pertahanan antara Maroko dan Israel sebagai "aliansi militer kotor."¹⁵ Menurutnya keputusan Maroko dalam menjalin hubungan ini semakin menjauhkan negara Maroko dari Aljazair dan rakyatnya.¹⁶ Lamamra menekankan bahwa aliansi ini mencerminkan kesamaan antara dua kekuatan regional yang dianggap ekspansionis dan mengabaikan hak-hak korban.

Jika dibandingkan dengan UAE, Bahrain, dan Sudan, kebijakan normalisasi Maroko menunjukkan tingkat oposisi domestik yang paling tinggi dengan demonstrasi yang teratur dan dukungan luas untuk Palestina dengan persentase 88%. Sudan memiliki tingkat oposisi yang tinggi-sedang dengan transisi politik paska kudeta 2021 yang terjadi antara militer (pro-normalisasi) dan sipil (kontra). Sedangkan Bahrain berada di tengah-tengah, dengan penolakan yang signifikan tetapi terbatas oleh tindakan keras pemerintah. Terakhir, UEA menjadi negara yang memiliki tingkat oposisi yang lebih rendah dengan kontrol ketat terhadap kebebasan sipil.

1.2 Rumusan Masalah

Maroko secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dalam Perjanjian Abraham Accords pada akhir tahun 2020. Selama empat tahun berjalannya perjanjian normalisasi ini (2020-2024), Maroko mendapatkan banyak respon dan kecaman negatif dari domestik dan internasional karena keputusan normalisasi ini dianggap bertentangan dengan identitas keislaman, solidaritas

¹⁵ Esnoe Faqih Wardhana, "Menlu Aljazair: Kesepakatan Maroko-Israel adalah Aliansi Militer Kotor," International Sidonews, Desember 05, 2021, diakses pada Desember 20, 2024, <https://international.sindonews.com/read/619475/44/menlu-aljazair-kesepakatan-maroko-israel-adalah-aliansi-militer-kotor-1638713573>.

¹⁶ APNews, "Algeria Breaks off Diplomatic Ties With Neighboring Morocco," The Associated Press (AP) News, Agustus 25, 2021, diakses pada Desember 20, 2024, <https://apnews.com/article/africa-algeria-morocco-9eff366c7de2783f5f63efa03e026720>.

terhadap Palestina, dan posisi historis Maroko sebagai pendukung kemerdekaan Palestina. Akan tetapi, Pemerintah Maroko tetap saja melanjutkan normalisasi dengan Israel dalam perjanjian Abraham Accords hingga hari ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis proses pengambilan keputusan luar negeri Maroko dalam melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah: Bagaimana proses pengambilan keputusan luar negeri Maroko dalam melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Maroko dalam melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords di tengah penolakan domestik dan internasional.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan akademik studi Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian kebijakan luar negeri Maroko dan Abraham Accords.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam isu ini dan menambah referensi dalam studi Ilmu Hubungan Internasional terutama dalam kajian kebijakan luar negeri Maroko dan Abraham Accords.

1.6 Studi pustaka

Sebagai bahan rujukan dalam proses penelitian menggunakan literatur yang relevan dan penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperkuat argumentasi yang disampaikan.

Kajian pustaka pertama adalah *The Significance of the Abraham Accords for Morocco* yang dipublikasikan oleh *KKI Policy Brief (Series of the Institute for Foreign Affairs and Trade)*.¹⁷ Artikel ini membahas sejarah singkat terbentuknya perjanjian Abraham yang Maroko ikuti sebagai penandatanganan normalisasi hubungan diplomatik dan ekonomi antara Maroko dan Israel serta dampaknya terhadap isu Sahara Barat. Pada 10 Desember 2020, Maroko dan Israel secara resmi menandatangani Deklarasi Bersama yang ditengahi oleh Amerika Serikat, mengikuti jejak Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Raja Mohammed VI sebagai pemimpin Maroko (1999 - Sekarang) dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel (1996 - Sekarang) dengan demikian membuka ruang kerja sama baru antara kedua negara. Dokumen tersebut membahas dua aspek dari proses normalisasi. Di satu sisi, dokumen tersebut menjelaskan niat Maroko dan Israel untuk mengizinkan penerbangan langsung antara kedua negara, menjalin hubungan diplomatik penuh, meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral, memberikan bantuan lebih lanjut dalam perdagangan, investasi, pariwisata, air, pertanian, dan pembangunan, serta membuka kembali kantor penghubung di Rabat dan Tel Aviv. Sebagai balasannya, Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat.

¹⁷ KKI Policy Brief, *The Significance of the Abraham Accords for Morocco*.

Meskipun kebijakan luar negeri Maroko tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, namun Israel dan Maroko memiliki hubungan historis di masa lalu. Hubungan antara kedua negara ini dimulai bahkan sebelum terbentuknya Negara Israel, ketika sejumlah besar orang Yahudi Maroko bermigrasi ke wilayah Israel saat ini. Keturunan orang Yahudi asal Maroko (sekitar 700.000 orang Israel) memiliki peran dalam proses normalisasi baru-baru ini selama bertahun-tahun. Setelah lahirnya Israel, pejabat pemerintah bermaksud untuk melakukan kontak dengan Maroko dan negara-negara lain di Maghreb, seperti Tunisia dan Aljazair. Selama Perdana Menteri Mesir, Gamal Abdel Nasser, memperkuat ideologi pan-Arab, hubungan antara Israel dan Maroko menjadi lebih hangat. Sebuah kesepakatan senjata ditandatangani pada tahun 1963, yang mengakibatkan Israel memberikan bantuan kepada Maroko untuk melawan Aljazair, yang pada gilirannya menerima bantuan dari Mesir selama Perang Pasir.

Dari tahun 2000 hingga penandatanganan Perjanjian Abraham, tonggak terpenting dalam hubungan antara kedua negara meliputi hal-hal berikut. Kantor penghubung ditutup di Israel pada tahun 2000, sementara Menteri Luar Negeri Israel Silvan Shalom melakukan kunjungan ke Maroko dan bertemu dengan Raja Mohammed VI pada tahun 2003. Empat tahun kemudian, Kantor Penghubung Luar Negeri ditutup di Israel pada tahun 2000, sementara Menteri Luar Negeri Israel Silvan Shalom melakukan kunjungan ke Maroko dan bertemu dengan Raja Mohammed VI pada tahun 2003. Terhitung 4 tahun setelah itu, Menteri kedua negara (Tzipi Livni dan Mohamed Benaissa) bertemu di Paris. Pada tahun 2009, Raja dan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon melakukan diskusi telepon tentang

peta jalan proses perdamaian di kawasan tersebut, di mana Raja Maroko menegaskan upaya negaranya menuju perdamaian yang adil dan langgeng.

Sekitar satu tahun sebelum tanggal penandatanganan, Benjamin Netanyahu dan Nasser Bourita mengadakan pertemuan rahasia. Ketika Perjanjian ditandatangani antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, Perdana Menteri Maroko Saad-Eddine El-Othmani menyatakan bahwa Maroko menolak normalisasi dengan 'entitas Zionis' karena memperkuat posisi Israel dalam pelanggaran hak-hak Palestina. Zionisme adalah sebuah gerakan nasionalis yang bertujuan untuk mendirikan dan mendukung negara Yahudi di tanah Palestina, yang dianggap sebagai tanah leluhur orang Yahudi. Peristiwa penting berikutnya adalah penandatanganan Deklarasi Bersama. Israel dan Maroko tidak pernah berperang satu sama lain, orang-orang Yahudi telah bermigrasi ke Israel selama beberapa dekade, dan kerja sama dalam masalah keamanan telah terjadi telah memudahkan kedua negara untuk menormalisasi hubungan mereka.

Kajian ini membantu peneliti untuk memahami faktor historis hubungan Maroko dan Israel sebelum kemerdekaan. Tulisan ini lebih berfokus pada faktor historis Israel tiba di Maroko dengan mengulas secara mendalam berbagai dimensi, termasuk aspek ekonomi, keamanan, diplomasi, etnis, dan agama, yang relevan dengan keputusan Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Aspek-aspek ini sangat penting dan membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Perbedaan tulisan penulis dengan penelitian ini adalah pada fokus pembahasan. Tulisan hanya deskriptif dan empiris menyoroti dampak Abraham Accords bagi Maroko dalam berbagai bidang tanpa membahas identitas politik

secara mendalam, sedangkan penelitian ini akan lebih fokus pada perubahan identitas politik dalam kebijakan luar negeri Maroko dan perubahan norma Arab.

Kajian pustaka kedua adalah *Israel and Morocco: From Clandestine Partnership to the Abraham Accords* oleh Jonathan Ghariani.¹⁸ Tulisan ini membahas sejarah panjang dan kompleks hubungan antara Maroko dan Israel yang telah dimulai dari kerja sama rahasia yang berlangsung sejak awal 1960-an hingga normalisasi resmi dalam kerangka Abraham Accords pada tahun 2020. Sebagai bagian dari dunia Arab, Maroko memilih jalur tersendiri dengan menjalin hubungan diplomatik informal dan kerja sama intelijen dengan Israel, terutama melalui kontak antara Mossad dan badan intelijen Maroko.

Salah satu peristiwa penting yang diulas adalah peran sentral Raja Hassan II dalam memfasilitasi pertemuan rahasia antara pejabat tinggi Israel dan Mesir menjelang tercapainya Kesepakatan Camp David tahun 1978. Maroko menjadi tuan rumah pertemuan rahasia antara Menachem Begin, Moshe Dayan, dan Hassan Tuhami. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas secara mendalam penarikan Israel dari Sinai serta kemungkinan perdamaian bilateral. Raja Hassan II tidak hanya menyediakan lokasi netral tetapi juga menjembatani kesenjangan politik dan psikologis antara dua musuh lama.

Lebih dari sekadar kepentingan geopolitik, dimensi sosial-budaya juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan kedua negara. Tulisan ini menyoroti peran strategis komunitas Yahudi Maroko yang menjadi jembatan

¹⁸ J Ghariani, "Israel and Morocco: From Clandestine Partnership to the Abraham Accords," Concordia.Ca (n.d.), <https://www.concordia.ca/content/dam/artsci/azrieli/docs/OccasionalPapers/OccasionalPaper-s-Issue1.pdf>.

emosional dan diplomatik antara Rabat dan Yerusalem. Eksodus besar-besaran warga Yahudi Maroko ke Israel pada pertengahan abad ke-20 tidak memutuskan tali, tetapi justru memperkuat hubungan melalui jaringan diaspora yang aktif. Beberapa tokoh Yahudi asal Maroko bahkan menjadi penasihat istana yang berpengaruh dalam isu hubungan luar negeri.

Selain kerja sama dalam bidang keamanan, tulisan ini juga mengangkat inisiatif di sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata yang mulai berkembang sejak 1980-an. Pada masa Perjanjian Oslo, hubungan kedua negara memasuki fase semi-resmi dengan dibukanya kantor penghubung di Rabat dan Tel Aviv, namun ini tidak berlangsung lama setelah Intifada Kedua. Dinamika regional seperti ancaman Iran dan dorongan dari Amerika Serikat membuka jalan bagi pemulihan hubungan yang kemudian secara resmi dinormalisasi melalui Abraham Accords pada tahun 2020.

Di samping hubungan bilateral yang terus berkembang, Maroko turut aktif dalam mendukung proses perdamaian Israel-Palestina di tingkat regional. Maroko tidak hanya membuka jalur komunikasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO), tetapi juga menjadi tuan rumah sejumlah forum dan konferensi multilateral yang mendorong kerja sama ekonomi dan diplomatik antara negara-negara Arab dan Israel. Raja Hassan II dan penerusnya, Raja Mohammed VI, menjalankan diplomasi yang penuh kalkulasi dengan menggabungkan orientasi strategis nasional dan kepekaan terhadap opini publik Arab dan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Kebijakan normalisasi Maroko dengan Israel bukanlah perubahan mendadak, melainkan hasil akumulasi

sejarah panjang kerja sama rahasia, kepentingan pragmatis, serta peran aktif Maroko dalam membentuk arsitektur diplomasi regional Timur Tengah.

Tulisan ini membantu peneliti dalam memahami bagaimana kebijakan normalisasi Maroko dengan Israel tidak semata-mata dipengaruhi oleh dinamika Israel-Palestina, melainkan juga oleh kepentingan strategis jangka panjang Maroko di bidang keamanan, ekonomi, dan diplomasi regional. Tulisan ini relevan karena memberikan bukti historis bahwa normalisasi merupakan kelanjutan dari hubungan yang sudah terjalin sejak lama. Selain itu, tulisan ini juga membantu peneliti dalam menyoroti peran penting Raja Hassan II dan Raja Mohammed VI dalam menjembatani kepentingan Arab dan Israel secara pragmatis.

Kajian pustaka ketiga oleh Intissar Fakir yang berjudul *Morocco and Israel: Economic Opportunities, Military Incentives, and Moral Hazard*.¹⁹ Tulisan ini membahas perkembangan hubungan bilateral antara Maroko dan Israel setelah normalisasi yang difasilitasi melalui Abraham Accords pada Desember 2020. Normalisasi hubungan Maroko dan Israel tidak muncul tiba-tiba, melainkan dilandasi oleh sejarah panjang keterhubungan sosial dan kultural, terutama dengan komunitas Yahudi asal Maroko.

Proses normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel didukung oleh narasi sejarah dan ikatan diaspora. Sekitar 130.000 Yahudi meninggalkan Maroko menuju Israel sejak akhir 1940-an hingga awal 1960-an yang menjadikan Maroko sebagai salah satu titik utama keberangkatan eksodus Yahudi dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Fakir menunjukkan bahwa pemerintah Maroko secara aktif

¹⁹ Intissar Fakir, *Morocco and Israel Opportunities, Military, and Moral Hazards*.

merestorasi dan merevitalisasi warisan Yahudi sebagai bagian dari upaya membangun citra sebagai negara Islam yang toleran dan plural. Bersamaan dengan itu, normalisasi ini juga memperkuat posisi geopolitik Maroko, terutama dalam konteks hubungan militer dengan Israel yang berkembang pesat, serta untuk memperkuat klaim kedaulatan atas Sahara Barat melalui dukungan strategis dari Amerika Serikat.

Tulisan ini membantu peneliti dalam memahami kebijakan luar negeri Maroko dalam konteks normalisasi dengan Israel melalui Abraham Accords, dari latar belakang hingga keuntungan Maroko dalam kesepakatan tersebut. Tulisan ini juga memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional, legitimasi budaya, dan diplomasi internasional saling berinteraksi. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini berfokus dalam analisis alasan Maroko masih melanjutkan normalisasi dengan Israel di tengah protes publik periode 2020-2024.

Kajian pustaka keempat adalah Transaksionalisme Amerika Serikat dalam Normalisasi Hubungan Maroko-Israel oleh Muhammad Ilham dan Arie Kusuma Paksi.²⁰ Tulisan ini mengulas kebijakan transaksional Amerika Serikat dalam proses normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel yang berlangsung pada tahun 2020. Dengan menggunakan konsep transaksionalisme sebagai alat analisis, artikel ini menyoroti bagaimana keputusan Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel bukan sekadar langkah diplomasi biasa, melainkan merupakan hasil dari kesepakatan strategis yang signifikan. Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump memainkan peran sebagai mediator

²⁰ Muhammad Ilham and Arie Kusuma Paksi, "Transaksionalisme Amerika Serikat Dalam Normalisasi Hubungan Maroko-Israel," *Politea* 5, no. 2 (2022): 157.

dan pemberi insentif utama, yang pada akhirnya memungkinkan terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

Keputusan Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel memicu reaksi beragam, baik di domestik maupun di internasional. Di domestik, keputusan ini menuai protes dari masyarakat dan kelompok oposisi yang masih kuat mendukung perjuangan Palestina. Demonstrasi besar terjadi di berbagai kota di Maroko, sementara negara-negara seperti Aljazair dan Iran mengecam langkah tersebut sebagai pengkhianatan terhadap prinsip solidaritas Arab dan Islam.

Tulisan ini membantu peneliti untuk menganalisis dinamika kebijakan luar negeri Maroko, serta bagaimana faktor eksternal seperti tekanan dan insentif dari AS dapat mempengaruhi keputusan politik suatu negara. Perbedaannya, penelitian penulis lebih menitik beratkan pada peran Amerika Serikat dan pendekatan transaksionalisme, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan luar negeri Maroko dan berfokus pada mencari tau alasan mengapa Maroko masih melanjutkan normalisasi dengan Israel di tengah protes publik periode 2020-2024.

Kajian pustaka kelima adalah *The Abraham Accords at One Year: Achievements, Challenges, and Recommendations for Israel* oleh Yoel Guzansky and Sarah Feuer.²¹ Tulisan ini membahas pencapaian dan tantangan yang dihadapi Israel setelah satu tahun penandatanganan Abraham Accords. Mereka menyoroti bahwa perjanjian *Abraham Accords* ini berhasil membuka pintu bagi normalisasi

²¹ Yoel Guzansky and Sarah Feuer, *The Abraham Accords at One Year: Achievements, Challenges, and Recommendations for Israel*, 2021.

hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko, yang menciptakan peluang baru di kawasan.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam bidang perdagangan dan investasi, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan utama, seperti resistensi dari Palestina dan negara-negara yang belum bergabung dalam perjanjian, serta ketidakpastian politik yang muncul di beberapa negara penandatangan. Guzansky dan Feuer menyarankan Israel untuk terus memperkuat hubungan dengan negara-negara penandatangan, menjaga keseimbangan politik regional, dan mengambil langkah diplomatik untuk mengurangi ketegangan terkait isu Palestina guna memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dari Abraham Accords.

Kajian ini membantu peneliti untuk melihat evaluasi pencapaian utama Abraham Accords, yang meliputi normalisasi hubungan diplomatik, rencana kerjasama ekonomi, dan peluang di sektor teknologi dan keamanan. Pencapaian ini memberikan gambaran tentang bagaimana Maroko, sebagai salah satu penandatangan perjanjian, memperoleh keuntungan dalam memperkuat posisinya di kawasan Timur Tengah. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu alasan Maroko masih meneruskan normalisasi sedangkan publik menentang keras keputusan tersebut.

Kajian pustaka keenam adalah *Abraham Accords: A Journey From Arab-Israeli to Palestinian-Israel Conflict* oleh Huma Baqai dan Sabiha Mehreen dalam Jurnal JISR-MSSE.²² Tulisan ini membahas adanya perubahan aliansi setelah

²² Huma Baqai and Sabiha Mehreen, "Abraham Accords: A Journey From Arab-Israeli to Palestinian-Israeli Conflict," *JISR management and social sciences & economics* 19, no. 1 (June 30, 2021): 113–126.

penandatanganan normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Israel melalui Abraham Accords. Upaya Israel menjalin hubungan dengan negara Arab menunjukkan bahwa Israel membentuk aliansi untuk melawan kekuatan Turkiye dan Iran.

Penandatanganan Abraham Accords yang menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel mengubah konflik awal yang melibatkan negara Arab Israel menjadi konflik yang hanya melibatkan Palestina dan Israel. Tulisan dari Baqai dan Mehreen ini membantu penulis memahami bahwa jika suatu negara Arab menjalin hubungan baik dengan Israel, maka kebijakan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pemikiran dan pendapat negara Arab lainnya tentang keberadaan Israel. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus pembahasannya, tulisan ini menitikberatkan pada konflik Palestina Israel, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada normalisasi hubungan Maroko dengan Israel dalam Abraham Accords.

Kajian pustaka selanjutnya adalah *The Abraham Accords and Israel-UAE normalization* oleh Sanam Wakil dan Neil Quilliam.²³ Tulisan ini membahas tentang Abraham Accords yang ditandatangani pada September 2020, yang mengukuhkan normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab (UAE), serta Bahrain. Dokumen ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong perjanjian tersebut, termasuk ketidakamanan regional akibat ketegangan antara AS dan Iran, serta persepsi ancaman yang serupa terhadap kelompok ekstremis dan aktivitas Iran. Selain itu, tulisan ini memperlihatkan peran penting Amerika Serikat dalam proses

²³ Sanam Wakil and Neil Quilliam, *The Abraham Accords and Israel-UAE Normalization - Shaping a New Middle East*, March 2023.

normalisasi ini dan implikasinya bagi dinamika regional yang lebih luas. Meskipun pada awalnya tidak berfokus pada kepentingan keamanan, normalisasi ini bertujuan untuk mengakhiri isolasi regional Israel dan memperkuat posisi UAE dalam arsitektur keamanan baru di Timur Tengah.

Tulisan ini membantu peneliti dalam membandingkan dinamika normalisasi yang terjadi antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) dengan kasus Maroko dalam kerangka Abraham Accords. Dengan menyoroti faktor-faktor geopolitik, peran Amerika Serikat, serta implikasi strategis dari normalisasi hubungan, kajian ini memberikan perspektif komparatif yang berguna dalam menganalisis motif dan konsekuensi kebijakan luar negeri Maroko. Perbedaan utama, seperti adanya prasyarat penghentian rencana aneksasi Tepi Barat dalam normalisasi UEA-Israel, menjadi poin penting dalam memahami bagaimana normalisasi Maroko lebih berorientasi pada kepentingan strategis tertentu, khususnya terkait dengan isu Sahara Barat.

Kajian Pustaka berikutnya oleh Syaikh Fathurahman yang berjudul Implementasi Abraham Accord dalam Usaha Normalisasi Hubungan Diplomatik antara Israel, UEA, dan Bahrain.²⁴ Tulisan ini memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana perjanjian Abraham Accord mempengaruhi arah kebijakan luar negeri UEA dan Bahrain. Perjanjian Abraham Accords ini juga mempengaruhi bagaimana normalisasi tersebut berdampak pada dinamika keamanan kawasan Timur Tengah. Kajian ini juga menyoroti peran Amerika Serikat sebagai aktor mediasi dan motif geopolitik yang melatarbelakangi keterlibatannya, termasuk

²⁴ Syaikh Fathurahman, "Implementasi Abraham Accords Dalam Usaha Normalisasi Hubungan Diplomatik Antara Israel, UEA Dan Bahrain," *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, no. December (2023).

dalam konteks rivalitas dengan Iran dan persaingan dengan kekuatan seperti Tiongkok.

Tulisan ini membantu peneliti dalam membandingkan pendekatan kebijakan normalisasi yang diambil oleh negara-negara Teluk seperti UEA dan Bahrain dengan pendekatan yang diambil oleh Maroko. Meskipun semua negara tersebut menjadi bagian dari perjanjian Abraham Accord, terdapat perbedaan konteks domestik, motif politik, dan respon dari masyarakat masing-masing negara. Dalam konteks Maroko, faktor identitas dan komunitas Yahudi-Maghribi menjadi dimensi penting yang melengkapi motif geopolitik, berbeda dengan pendekatan lebih realistis-ekonomis yang diambil oleh UEA dan Bahrain sebagaimana dijelaskan dalam kajian ini.

Kajian pustaka selanjutnya adalah *Normalization of Sudanese and Israeli Relations: From Hostility to Pragmatic Conciliation* oleh Abdulgani Bozkurt dan Mayada Kamal Eldeen.²⁵ Artikel ini mengkaji proses transformasi hubungan diplomatik Sudan-Israel dari masa permusuhan historis menjadi upaya normalisasi pragmatis, terutama setelah tergulingnya Omar al-Bashir dan masuknya Sudan dalam kerangka Abraham Accords. Dengan menggunakan metode *process tracing*, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun normalisasi hubungan tersebut dianggap sebagai perubahan drastis oleh sebagian pengamat, namun terdapat kesinambungan dalam kebijakan luar negeri Sudan terhadap Israel sejak masa sebelum kemerdekaan hingga pasca-kudeta 2019.

²⁵ Abdulgani Bozkurt and Mayada Kamal Eldeen, "Normalization of Sudanese and Israeli Relations: From Hostility to Pragmatic Conciliation," *İçtimaiyat* 6, no. 1 (2022): 327–343.

Tulisan ini membantu peneliti dalam membandingkan proses normalisasi yang dilakukan oleh Sudan dengan pendekatan Maroko dalam Abraham Accords. Meskipun kedua negara tergabung dalam gelombang negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel, konteks domestik, dinamika politik, dan tekanan eksternal sangat berbeda. Sudan, misalnya, menormalkan hubungan dalam kondisi transisi politik dan tekanan ekonomi yang berat. Hal tersebut dilakukan Sudan demi mendapatkan pencabutan sanksi dan bantuan ekonomi. Dengan demikian, perbandingan ini memperkaya pemahaman tentang variasi logika di balik tindakan normalisasi di tiap negara.

Kajian pustaka terakhir adalah *From New to Normal: Two Years after the Abraham Accords* oleh Petra Dachtler.²⁶ Tulisan ini mengulas perkembangan hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab yang terlibat dalam Abraham Accords dua tahun setelah penandatanganannya. Dachtler menyoroti bahwa meskipun kesepakatan tersebut berhasil membuka peluang besar dalam hal normalisasi hubungan, seperti peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Israel dan negara-negara penandatangan, proses normalisasi ini tidak berlangsung tanpa tantangan.

Meskipun hambatan dalam kerjasama tetap ada, termasuk ketegangan dalam masyarakat Arab terkait dengan solidaritas terhadap Palestina serta tantangan politik domestik di beberapa negara yang terlibat. Dachtler juga mencatat bahwa peran Amerika Serikat sebagai mediator dan penjamin kesepakatan ini tetap krusial dalam mempertahankan momentum hubungan baru tersebut. Setelah dua tahun,

²⁶ Petra Dachtler, "From New to Normal: Two Years after the Abraham" (2022), <https://doi.org/10.57671/gfme-22052>.

proses normalisasi menjadi semakin kuat, meskipun dengan derajat dan cakupan yang berbeda-beda tergantung negaranya. Israel mengalami peningkatan penerimaan di kawasan sehingga Israel bisa menjangkau isu-isu keamanan.

Tulisan ini membantu peneliti untuk memberikan gambaran yang lebih realistis tentang bagaimana Abraham Accords telah bertransformasi dari kesepakatan baru menjadi sebuah hubungan yang semakin normal. Perbedaan penelitian ini dengan tulisan penulis adalah pada fokus pembahasan. Tulisan ini hanya meninjau perkembangan dua tahun setelah Abraham Accords dalam konteks yang lebih luas, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada Maroko dengan menganalisis alasan mengapa Maroko masih menormalisasi hubungan dengan Israel di tengah penolakan publik dengan konsep yang digunakan, *Logics of Action*.

1.7 Kerangka pemikiran

1.7.1 *Logics of Action*

Dalam studi Hubungan Internasional, pemahaman tentang bagaimana negara bertindak dalam kebijakan luar negeri menjadi aspek yang penting dalam menjelaskan berbagai fenomena global.²⁷ Konstruktivisme dalam hubungan internasional hadir sebagai paradigma baru yang menantang dominasi realisme dan liberalisme dengan menekankan peran identitas, norma, dan konstruksi sosial dalam membentuk perilaku negara.²⁸ Konstruktivis adalah alat yang tidak hanya berguna untuk memahami kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai panduan untuk

²⁷ Isa Erbas, *Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations*, 2022, <http://journalppw.com>.

²⁸ Lintang Wahyu Sudibyo, *Perjuangan Mengukuhkan Identitas Nasional: Aneksasi Rusia Di Krimea Dalam Perspektif Konstruktivisme*, *Journal of International Relations*, vol. 4, 2018, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.

meresepkan kebijakan luar negeri.²⁹ Oleh karena itu, analisis kebijakan luar negeri dalam konstruktivis tidak cukup hanya dengan melihat kepentingan atau strategi rasional, akan tetapi juga harus memahami bagaimana identitas nasional dan nilai-nilai normatif terbentuk dan dilembagakan dalam konteks sosial tertentu.

Untuk memahami bagaimana norma dan identitas memengaruhi kebijakan luar negeri secara konkret, konstruktivis tidak hanya melihat struktur sosial internasional, tetapi juga menaruh perhatian pada bagaimana agen-agen negara yang menafsirkan peran dan identitas mereka di dalam struktur tersebut. Agen di dalam paradigma ini merujuk pada aktor sosial baik itu aktor negara maupun non negara yang membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial melalui proses interaksi, internalisasi norma, dan konstruksi identitas. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana agen merespon situasi politik dan pembuatan kebijakan luar negeri

berdasarkan apa yang dianggap pantas sekaligus apa yang dapat menguntungkan dari persepsi mereka. Oleh karena itu, konstruktivis membutuhkan perangkat analisis yang mampu menjelaskan proses internal pengambilan keputusan, termasuk bagaimana agen memilih antara kepentingan material dan nilai-nilai normatif. Di sinilah konsep *logic of action* menjadi relevan sebagai instrumen analitis dalam memahami perilaku agen negara dari sudut pandang konstruktivis.

March, J. G., & Olsen, J. P. adalah dua ilmuwan politik terkemuka yang mengemukakan konsep *logics of action* dalam karya klasik mereka berjudul

²⁹ Maysam Behraves, *The Relevance of Constructivism to Foreign Policy Analysis*, 2011, <https://www.e-ir.info/2011/07/17/the-relevance-of-constructivism-to-foreign-policy-analysis/>.

"Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics" (1989).³⁰

Kemudian March dan Olsen mempertegas kembali dalam konsep tersebut di dalam bukunya yang berjudul *The Institutional Dynamics of International Political Orders*.³¹ Di dalam karya tersebut mereka memperkenalkan dua logika utama dalam pengambilan keputusan politik untuk menjelaskan bagaimana aktor politik membuat keputusan dalam kerangka institusi domestik dari konteks teori institusionalisme, yaitu *Logic of Consequences* yang menekankan rasionalitas strategis berbasis kalkulasi untung-rugi, dan *Logic of Appropriateness* yang menekankan pentingnya norma, nilai, dan peran institusional dalam membentuk tindakan yang dianggap pantas. Konsep ini kemudian diadopsi dan dikontekstualisasikan oleh Trine Flockhart dalam studi hubungan internasional melalui pendekatan konstruktivis di dalam buku *Foreign Policy Third Edition* yang diedit oleh Steve Smith, Amelia Hadfield, dan Tim Dunne dalam sub bab buku *Constructivism dan Foreign Policy Analysis* untuk memahami pola pikir dan mekanisme pengambilan keputusan aktor negara.³²

Berbeda dengan March dan Olsen yang menitikberatkan pada peran institusi formal dalam konteks domestik, Flockhart memaknai *Logic of Appropriateness* sebagai cerminan dari internalisasi norma sosial, identitas kolektif, dan konstruksi makna yang dibentuk melalui interaksi sosial internasional.³³ Jika March dan Olsen hanya fokus pada bagaimana institusi membentuk perilaku aktor melalui aturan dan

³⁰ James G. March and Johan P. Olsen, "Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics," 1989.

³¹ James G. March and Johan P. Olsen, *The Institutional Dynamics of International Political Orders*, Source: *International Organization*, vol. 52 (The MIT Press, 2014).

³² Trine Flockhart, "Constructivism and Foreign Policy," in *Journal GEEJ*, ed. Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne, Third Edition., vol. 7 (United Kingdom: Oxford University Press, 2016), 79–93, http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf.

³³ Flockhart, 88.

peran yang mapan, maka Flockhart lebih menekankan pada bagaimana identitas negara dan norma internasional memandu agen negara dalam merespons isu-isu kebijakan luar negeri secara "pantas" menurut persepsi mereka sendiri.³⁴ Perbedaan ini menunjukkan perluasan konteks dan kedalaman analisis dalam penggunaan *Logics of Action* dari ruang lingkup domestik yang struktural ke ruang lingkup internasional yang lebih ideasional dan normatif.³⁵

Tabel 1. 1 Perbandingan Konsep Logics of Action March & Olsen, dan Trine Flockhart

Sumber: March and Olsen, dan Trine Flockhart

Aspek	March & Olsen (1989)	Trine Flockhart (2005)
Konsep dasar	Mengemukakan dua logika tindakan: <i>Logic of Appropriateness</i> dan <i>Logic of Consequences</i> .	Mengadopsi dua logika tersebut, lalu mengadopsinya dalam analisis kebijakan luar negeri berbasis konstruktivisme.
Fokus utama	Kekuatan institusi sebagai struktur formal dan informal dalam membentuk perilaku aktor melalui aturan, peran, dan harapan yang mapan.	Identitas negara dan norma internasional memandu agen dalam bertindak sesuai persepsi mereka terhadap apa yang pantas, (konstruksi sosial sebagai pedoman).
Fokus analisis	Teori institusional baru (New Institutionalism).	Studi kebijakan luar negeri berbasis konstruktivisme dan intersubjektivitas norma.
Tujuan Analisis	Menjelaskan perilaku individu/aktor dalam organisasi dan institusi politik.	Menjelaskan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri berdasarkan norma, identitas, dan kepentingan nasional.
<i>Logic of Consequences</i> (LoC)	Tindakan diambil berdasarkan kalkulasi	Digunakan untuk memahami kebijakan luar

³⁴ James G. March and Johan P. Olsen, "Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics."

³⁵ March and Olsen, *The Institutional Dynamics of International Political Orders*, vol. 52, p. .

	untung-rugi (<i>cost-benefit analysis</i>). Rasional-instrumental.	negeri yang didorong oleh kepentingan strategis, seperti keamanan atau ekonomi (<i>cost-benefit</i>).
<i>Logic of Appropriateness</i>	Peran institusi formal dalam konteks domestik	Cerminan dari internalisasi norma sosial, identitas kolektif, dan konstruksi makna yang dibentuk melalui interaksi sosial internasional.

Menurut Trine Flockhart di dalam bukunya *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*, konteks historis, budaya, politik, dan sosial dari agen sangat penting karena identitas, norma, dan makna yang membentuk perilaku aktor tidak muncul secara alamiah atau statis, melainkan terbentuk secara sosial melalui pengalaman historis dan interaksi terus-menerus dalam lingkungannya.³⁶ Flockhart menekankan bahwa agensi dan struktur bersifat saling membentuk (*mutually constitutive*), di mana tindakan luar negeri negara mencerminkan pemahaman mereka tentang siapa mereka (identitas), apa yang mereka yakini benar (norma), dan bagaimana mereka seharusnya bertindak (peran) berdasarkan latar belakang sejarah, nilai-nilai budaya, kondisi politik domestik, serta dinamika sosial masyarakatnya.

Konsep logika tindakan (*logics of action*) di sini berusaha untuk menjelaskan bagaimana perilaku aktor dalam hubungan internasional tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor material atau kepentingan egois, tetapi juga oleh norma, nilai, dan identitas sosial yang terbentuk dalam konteks interaksi. Paradigma konstruktivisme berargumen bahwa realitas sosial dibangun melalui proses interaksi, di mana individu dan negara menciptakan makna dan ekspektasi yang

³⁶ Trine Flockhart, 87.

memengaruhi tindakan mereka. Dalam kerangka ini, logika tindakan mencerminkan cara di mana aktor menginterpretasikan situasi dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka tentang norma yang berlaku dan identitas yang mereka miliki.

Pendekatan *logics of action* menjadi penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara untuk menjelaskan bagaimana suatu negara mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan kepentingan material atau tekanan internasional.³⁷ Namun, juga karena adanya norma yang membentuk persepsi tentang apa yang dianggap sesuai. Oleh karena itu, muncullah dua logika utama dalam proses pengambilan keputusan menurut Flockhart.³⁸

1. *Logic of Consequences (LoC)*

Menurut Flockhart, pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan berdasarkan kalkulasi untung-rugi guna memaksimalkan kepentingan negara. *Logic of Consequences (LoC)* adalah tindakan yang didasarkan pada evaluasi rasional terhadap konsekuensi dari berbagai alternatif yang tersedia. Pendekatan ini penting dalam kebijakan luar negeri karena memungkinkan negara untuk mengambil keputusan berdasarkan perhitungan rasional mengenai keuntungan dan kerugian dari suatu tindakan.³⁹

Logika ini sering dikaitkan dengan model rasional dalam pengambilan keputusan, di mana aktor berusaha mengoptimalkan tujuan mereka berdasarkan

³⁷ Markus Kornprobst, "The Agent's Logics of Action: Defining and Mapping Political Judgement," *International Theory* 3, no. 1 (2011): 70–104.

³⁸ Trine Flockhart, 87-88

³⁹ Martin Schulz, "Logic of Consequences And Logic of Appropriateness," in *The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management* (Palgrave Macmillan, 2013).

informasi yang tersedia. Oleh sebab itu, pendekatan ini banyak ditemukan dalam kebijakan luar negeri yang berbasis pragmatisme yang tidak selalu berpegang pada nilai-nilai ideologis. Flockhart melihat negara yang mengadopsi logika ini akan lebih cenderung bertindak fleksibel dan oportunis dalam diplomasi internasional, dengan mengutamakan negosiasi yang menghasilkan keuntungan nyata dibandingkan sekadar mempertahankan norma atau etika politik tertentu.⁴⁰

Logic of Consequences (LoC) dapat dianalisis dengan mengidentifikasi tujuan strategis negara, menganalisis perhitungan risiko dan manfaat yang diperoleh oleh negara dengan meninjaunya dari dokumen kebijakan dan pernyataan resmi yang menunjukkan kalkulasi risiko dan hasil yang diharapkan.⁴¹ Setiap keputusan yang diambil oleh negara biasanya berorientasi pada kepentingan tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi stabilitas dan perkembangan nasionalnya. Setelah tujuan strategis ditemukan, langkah berikutnya adalah menganalisis perhitungan risiko dan manfaat dari kebijakan yang diambil.⁴²

Negara perlu mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan serta mengevaluasi potensi keuntungan dan kerugian yang dapat timbul sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Pertimbangan ini menjadi penting bagi negara untuk dapat menghindari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dan memaksimalkan hasil yang menguntungkan.⁴³ Selain itu, dalam menganalisis suatu kebijakan luar negeri, penting juga untuk meninjau dokumen kebijakan dan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pernyataan pemimpin negara, strategi diplomasi yang

⁴⁰ Trine Flockhart, "Constructivism and Foreign Policy."

⁴¹ Trine Flockhart, "The Problem of Change in Constructivist Theory: Ontological Security Seeking and Agent Motivation," *Review of International Studies* 42, no. 5 (December 1, 2016): 799–820.

⁴² Metin Esen, "The Logic of Appropriateness and The Logic of Consequences" (n.d.).

⁴³ March and Olsen, *The Institutional Dynamics of International Political Orders*, vol. 52, p. .

disampaikan, serta dokumen kebijakan yang diterbitkan dapat menjadi indikator apakah suatu keputusan lebih berorientasi pada hasil yang diinginkan atau justru dipengaruhi oleh faktor lain seperti norma dan identitas nasional. Ketiga aspek tersebut membantu peneliti untuk menganalisis bagaimana logika ini bekerja dalam kebijakan luar negeri.

2. *Logic of Appropriateness (LoA)*

Menurut Flockhart, *Logic of Appropriateness (LoA)* adalah tindakan yang dipandu oleh norma, aturan, dan identitas sosial yang relevan dalam suatu situasi tertentu. Pendekatan ini penting dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri karena menekankan pada norma, identitas, dan aturan yang dianggap pantas dalam komunitas internasional tanpa mengabaikan keuntungan material.⁴⁴ Logika ini juga berperan dalam membentuk perilaku negara agar sesuai dengan ekspektasi sosial, baik dalam lingkup domestik maupun internasional.⁴⁵

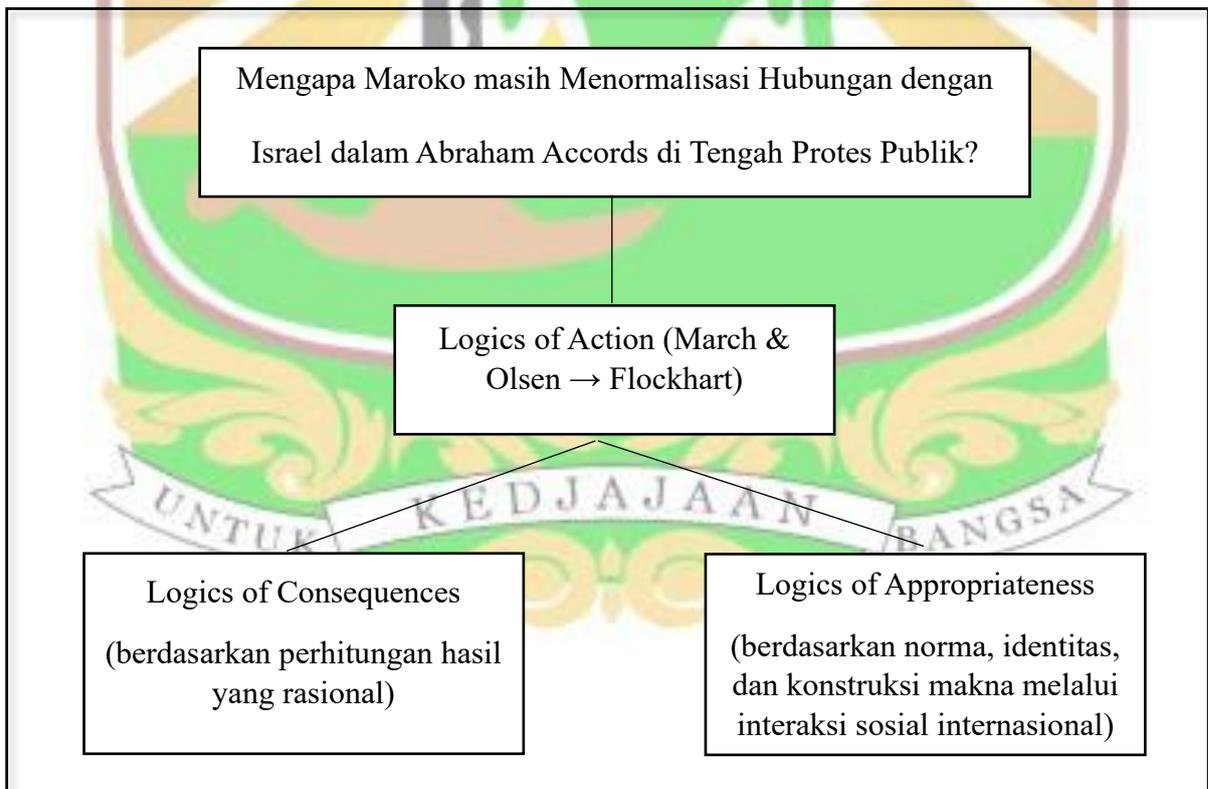
Keputusan dalam LoA tidak selalu mempertimbangkan konsekuensi secara langsung, tetapi lebih mengutamakan kepatuhan terhadap standar yang berlaku dalam lingkungan mereka. Negara akan bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di komunitas internasional atau regional tempat dimana negara tersebut berinteraksi. Flockhart menawarkan pendekatan yang lebih normatif dalam memahami kebijakan luar negeri. Pendekatan ini memberikan pemahaman tentang "apa yang benar" dan "apa yang pantas".⁴⁶

⁴⁴ Trine Flockhart, "Constructivism and Foreign Policy."

⁴⁵ Metin Esen, "The Logic of Appropriateness and The Logic of Consequences" (n.d.).

⁴⁶ Kornprobst, "The Agent's Logics of Action: Defining and Mapping Political Judgement."

LoA dapat dianalisis dengan menganalisis norma dan identitas yang berlaku yang memandu perilaku negara. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya, sejarah, dan peran yang dipegang oleh negara dalam komunitas internasional. Selanjutnya, menganalisis wacana dan retorika diplomasi yang digunakan oleh pemerintah dapat mengungkap bagaimana argumen moral, sejarah, atau identitas digunakan untuk membenarkan kebijakan tertentu. Terakhir, meninjau reaksi domestik dan internasional terhadap kebijakan tersebut membantu memahami sejauh mana tindakan tersebut dianggap sesuai dengan ekspektasi normatif.⁴⁷ Pendekatan ini membantu peneliti analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor normatif yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hubungan internasional.



⁴⁷ March and Olsen, *The Institutional Dynamics of International Political Orders*, vol. 52, p. .

Gambar 1. 1 Model Analitik Kebijakan Normalisasi Maroko dengan Israel dalam Abraham Accords

Sumber: Penulis

Melalui pendekatan logika tindakan, peneliti menganalisis alasan mengapa Maroko masih menormalisasi hubungan dengan Israel dalam kerangka Abraham Accords di tengah penolakan publik. Berdasarkan asumsi peneliti, keputusan Maroko tersebut dianggap sebuah pilihan yang berdasarkan logika tindakan.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh dari tulisan yang diperoleh dari pertanyaan resmi, jurnal, dokumen, dan penelitian sebelumnya ataupun data sekunder lainnya. Menurut Yudin Citriadin, metode penelitian yang dilakukan dalam kondisi alami (natural setting), menggunakan peneliti sebagai instrumen utama, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan budaya melalui pengumpulan data deskriptif seperti ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁸ Menurut Aully Grashinta dan Feliks Arfid Guampe e, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami makna mendalam dari fenomena sosial dan kemanusiaan dengan cara menitikberatkan pada eksplorasi realitas yang bersifat kompleks, subjektif, dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, serta sejarah.⁴⁹

⁴⁸ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2020.

⁴⁹ Aully Grashint and Feliks Arfid Guamp, "Metode Penelitian Kualitatif," August 2023, <https://www.researchgate.net/publication/380401514> Metode Penelitian Kulitatif Teori Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai fenomena tertentu dengan fokus pada hubungan sebab-akibat atau mekanisme yang mendasari fenomena tersebut dalam konteks sosial tertentu. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan fenomena tetapi juga untuk menginterpretasikan dan menjelaskan mengapa dan alasan suatu peristiwa terjadi.⁵⁰ Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menganalisis proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Maroko dalam melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords di tengah penolakan domestik dan internasional yang menentang keputusan pemerintah Maroko dalam Abraham Accords.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya batasan masalah agar fokus penelitian dapat dipersempit dan pembahasan penelitian tidak melebar sehingga penelitian akan koheren dengan latar belakang dan rumusan masalah. Batasan waktu dalam penelitian ini adalah pada tahun 2020-2024. Tahun 2020 merupakan tahun dimana Maroko secara resmi menyepakati Perjanjian Abraham Accords dengan Israel. Alasan pemilihan tahun 2024 ini adalah relevansi kronologisnya dalam memahami perkembangan kebijakan luar negeri Maroko terkait kesepakatan perjanjian *Abraham Accords*. Tahun 2020 adalah tonggak awal terbentuknya kesepakatan secara resmi yang mana Maroko menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada akhir tahun 2020 di bulan Desember. Periode ini menandai fase krusial dalam politik luar negeri Maroko, dimana keputusan strategis mulai diambil,

⁵⁰ Yudin Citriadin, "Metode Penelitian Kualitatif."

sembari menghadapi reaksi dari aktor-aktor domestik dan kawasan Arab yang beragam.

Penelitian dibatasi hingga tahun 2024 karena mencakup periode di mana dampak kebijakan tersebut dapat mulai diamati. Hal ini meliputi kegagalan tujuan normalisasi, alasan Maroko masih menormalisasi hubungan dengan Israel, dan respon yang muncul dari level domestik, kawasan, dan internasional. Selain itu, tahun 2024 dipilih sebagai batas akhir untuk memastikan data yang relevan masih bersifat aktual dan mencerminkan tren kebijakan luar negeri terkini. Hal ini memberikan konteks yang memadai untuk menganalisis keputusan Maroko dalam kerangka *Logics of Action*.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah unit tertentu yang perilakunya dianalisis, dijelaskan, dan diramalkan. Unit eksplanasi adalah unit yang memberikan pengaruh terhadap unit analisis.⁵¹ Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Maroko sedangkan unit eksplanasinya adalah kebijakan normalisasi dalam Abraham Accords.

Level analisis merupakan tingkat dari objek kajian yang diteliti. Mohtar Mas'ud mengidentifikasi beberapa tingkatan analisis dalam studi hubungan internasional, yaitu individu, kelompok individu, negara-bangsa, kelompok negara dalam suatu kawasan, dan sistem global.⁵² Level analisis penelitian ini berada pada level negara. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan mengapa Maroko masih menormalisasi hubungan dengan Israel dalam Abraham Accords.

⁵¹ Mochtar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, n.d.

⁵² Mochtar Mas'ud, 49.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan melakukan literatur yang diklasifikasikan. Ini berkaitan dengan kebijakan luar negeri Maroko dan hubungannya dengan hubungan antara Maroko dan Israel yang diambil dari media massa (seperti Times of Israel, Aljazeera, Britannica, Reuters AFP dan lain sebagainya), artikel jurnal dari research gate, Policy Brief KKI dan lainnya, buku, internet, hingga laporan resmi dari website arsip U.S. Departement of State lainnya. Untuk mengakses informasi melalui internet, peneliti menggunakan kata kunci seperti *Morocco's foreign policy*, *Normalization*, *Morocco and Israel Relations*, *Abraham Accords*, *Constructivism*, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain sebelum digunakan untuk penelitian baru. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, publikasi, atau database yang telah ada, dan dapat diakses melalui berbagai sumber seperti perpustakaan umum, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, sumber daya online, serta sumber data lainnya yang berkaitan dengan hubungan Maroko dengan Israel yang menormalisasikan hubungan diplomatik secara resmi.⁵³

1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Sandu Siyoto.⁵⁴ Analisis ini bertujuan untuk mengorganisir dan menginterpretasikan data secara

⁵³ Val Hyginus and U Eze, *Qualitative Research*, 2023, www.idosr.org.

⁵⁴ Sodik and Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1," *Dasar Metodologi Penelitian* (2015): 83–84.

sistematis agar diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, metode analisis data yang digunakan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁵

Pendekatan ini membantu peneliti dalam menyaring dan menyusun data yang kompleks menjadi informasi yang bermakna, khususnya dalam menelusuri logika tindakan yang mendorong kebijakan luar negeri Maroko terhadap normalisasi hubungan dengan Israel.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan awal peneliti dalam mengumpulkan informasi pendukung penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder dari artikel ilmiah, artikel berita, dokumen, publikasi dan data terkait lainnya mengenai kebijakan luar negeri Maroko. Data yang terkumpul akan peneliti analisis berdasarkan konsep yang digunakan.

2. Analisis Data

Tahap berikutnya adalah analisis data, di mana peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan tematik. Data yang didapatkan akan dikelompokkan ke dalam 2 pembagian logika tindakan (*logic of consequences* dan *logic of appropriateness*). Data yang termasuk dalam kategori *logic of consequences* akan dianalisis berdasarkan pertimbangan rasional aktor negara terhadap manfaat dan kerugian dari tindakan normalisasi hubungan dengan Israel.

Sementara itu, data yang diklasifikasikan dalam *logic of appropriateness*

⁵⁵ Sandu Siyoto, 122.

dianalisis berdasarkan kesesuaian tindakan dengan identitas, norma, dan nilai-nilai yang di miliki oleh Maroko. Analisis data tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis dekriptif guna menjawab pertanyaan penelitian.

3. Kesimpulan

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan pemaknaan terhadap pola-pola data yang telah disajikan. Kesimpulan ditarik dengan mengaitkan keputusan politik Maroko untuk tetap melakukan normalisasi dengan Israel sebagai tindakan yang dilandasi oleh logika tindakan. Kesimpulan tersebut akan memperkuat tulisan penelitian dan membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian dengan menghubungkan temuan utama dengan teori yang digunakan. Dengan demikian, teknik analisis data Sandu Siyoto memberikan landasan yang kuat untuk memahami dinamika kebijakan normalisasi hubungan Maroko dengan Israel dalam Abraham Accords secara komprehensif dan mendalam.

1.9 Sistematika Penulisan:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual/teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini akan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara keseluruhan.

BAB II : NORMALISASI MAROKO DENGAN ISRAEL DALAM

ABRAHAM ACCORDS

Bab ini akan membahas Latar belakang terbentuknya perjanjian, isi dan implementasi kesepakatan, dan dinamika hubungan Maroko-Israel pasca ditandatanganinya kesepakatan Abraham Accords. Selain itu, bab ini juga membahas kepentingan Maroko dalam Abraham Accords.

BAB III : RESPON PENOLAKAN DOMESTIK DAN INTERNASIONAL TERHADAP NORMALISASI MAROKO DENGAN ISRAEL

Bab ini menganalisis berbagai bentuk penolakan terhadap kebijakan normalisasi Maroko. Hal ini mencakup respon domestik, Internasional seperti dari Iran dan Aljazair, dan strategi pemerintah dalam menghadapi penolakan. Bab ini juga membahas bagaimana faktor historis dan identitas nasional berkontribusi terhadap resistensi publik.

BAB IV : ANALISIS LOGICS OF ACTION DARI KEBIJAKAN NORMALISASI MAROKO DENGAN ISRAEL DALAM ABRAHAM ACCORDS

Pada bab ini akan menyajikan hasil analisis alasan mengapa Maroko masih menormalisasi hubungan dengan Israel dalam Abraham Accords di tengah penolakan publik. Penyajian analisis akan menggunakan pemikiran dari March dan Olsen yang dikolaborasi oleh Trine Flockhart dengan konsep *Logics of Action*. Dalam konsep ini akan menganalisis logika tindakan dengan melihat mekanisme *logic of consequences* (LoC), dan *logic of appropriateness* (LoA) dalam kebijakan luar negeri Maroko guna menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran untuk penelitian bagi peneliti, dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

